



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 3319-3329

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pendekatan Dynamic Security Terhadap WBP Lansia Di Lapas Kelas 1 Sukamiskin

Mitro Subroto<sup>1\*</sup>, Rakean Dimas Pamuna<sup>2</sup>

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: [subrotomitro07@gmail.com](mailto:subrotomitro07@gmail.com)<sup>1\*</sup>

### Abstrak

Pendekatan Dynamic Security bagi Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) lansia di Lapas Kelas 1 Sukamiskin berfokus pada manajemen keamanan yang fleksibel dan berorientasi pada kemanusiaan. Melalui pendekatan ini, interaksi yang lebih erat antara petugas dan WBP, khususnya yang berusia lanjut, bertujuan untuk menciptakan rasa aman yang lebih kuat. Pendekatan tersebut juga memungkinkan petugas memahami kebutuhan khusus WBP lansia, meminimalkan konflik, serta meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental mereka. Implementasi Dynamic Security diharapkan mampu menciptakan lingkungan penjara yang lebih nyaman dan aman bagi WBP lansia, sambil tetap menjaga ketertiban dan keamanan di dalam Lapas.

Kata Kunci: *Dynamic Security, WBP Lansia, Lapas Kelas 1 Sukamiskin*

## Abstract

The Dynamic Security approach for elderly correctional inmates (WBP) in Sukamiskin Class 1 Prison focuses on flexible and humanitarian-oriented security management. Through this approach, closer interaction between officers and WBP, especially the elderly, aims to create a stronger sense of security. This approach also allows officers to understand the special needs of elderly WBP, minimize conflict, and improve their physical and mental well-being. The implementation of Dynamic Security is expected to be able to create a more comfortable and safe prison environment for elderly inmates, while still maintaining order and security in prison.

Keywords: *Dynamic Security, Elderly WBP, Sukamiskin Class 1 Prison*

## PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang termasuk kedalam integrasi justice sytem yang menjadi muara dalam system peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang melakukan proses pembimbingan dan pembinaan serta melakukan pengamanan dan keamanan kepada para narapidana yang ada dalam lembaga pemasyarakatan, proses keamanan dan pengamanan yang diberikan juga harus bersifat humanisme karena mengingat bahwa lapas juga di isi oleh narapidana dengan berkebutuhan khusus salah satunya narapidana lansia("Optimalkan Pembinaan Kemandirian, Lapas Kelas I Medan Laksanakan Perjanjian Kerjasama Dengan 4 Stakeholder - Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan," n.d.).

Terdapat aturan khusus yang mengatur tentang adanya perlakuan khusus terhadap narapidana lansia hal ini diatur dalam peraturan Menteri hukum dan Ham nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan secara yuridis secara khusus bagi narapidana lansia dan memastikan hak-hak narapidana ini didapatkan sesuai aturan yang ada dalam peraturan yang telah ditetapkan secara materiil dalam peraturan Menteri(Indonesia, 1999).

Lapas Kelas 1 Sukamiskin merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang memiliki karakteristik unik karena menampung berbagai kategori Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), termasuk WBP yang berusia lanjut atau lansia. Keberadaan WBP lansia di dalam lembaga pemasyarakatan menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan mereka. Lansia, secara umum, mengalami penurunan kemampuan fisik, kognitif, dan mental seiring bertambahnya usia. Kondisi ini membuat mereka lebih rentan terhadap berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, penanganan WBP lansia memerlukan pendekatan yang

berbeda dibandingkan dengan WBP yang berusia lebih muda, terutama dalam hal pengamanan dan perlakuan sehari-hari.

Dalam situasi tersebut, pendekatan keamanan tradisional yang bersifat represif dan kaku sering kali tidak efektif. Pengamanan yang terlalu ketat, tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan, dapat memperburuk kondisi WBP lansia. Kondisi fisik mereka yang lemah dapat memperbesar risiko terjadinya perlakuan yang tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia (HAM) yang diamanatkan oleh undang-undang. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah sistem yang lebih adaptif dan humanis dalam menangani WBP lansia. Pendekatan Dynamic Security muncul sebagai salah satu metode yang dinilai relevan untuk diterapkan dalam kondisi ini.

Dynamic Security merupakan pendekatan pengelolaan keamanan yang bersifat dinamis, di mana interaksi antara petugas masyarakat dan WBP menjadi fokus utama. Pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan yang lebih personal dan interaktif antara petugas dengan WBP, sehingga tercipta lingkungan yang aman namun tetap mempertimbangkan kemanusiaan. Dalam penerapan Dynamic Security, petugas tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendamping dan pemberi arahan kepada WBP. Hal ini sangat penting, terutama bagi WBP lansia, karena mereka sering kali memerlukan perhatian ekstra terkait kesehatan, pengawasan, dan kesejahteraan mental mereka. Pendekatan yang lebih humanis ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan, meminimalisir konflik, serta menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan harmonis di dalam lapas.

Landasan yuridis dari pendekatan Dynamic Security di Lapas Kelas 1 Sukamiskin sebenarnya sudah diatur dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat. Dalam undang-undang ini, sistem masyarakat ditekankan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk rehabilitasi, pembinaan, serta pemulihan fungsi sosial WBP (Dasar, Indonesia, & Dasar, 2022), sehingga mereka dapat kembali berperan aktif di masyarakat setelah menjalani masa pidana. Undang-undang ini juga menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam seluruh proses masyarakat, termasuk dalam pengelolaan keamanan. Sistem masyarakat yang hanya mengandalkan kontrol ketat tanpa mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi dan hak asasi WBP, termasuk WBP lansia, dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang diusung undang-undang tersebut.

Selain itu, pelaksanaan pendekatan Dynamic Security dalam masyarakat lansia juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat. Dalam peraturan ini, diatur bahwa setiap WBP berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, termasuk hak untuk memperoleh perawatan kesehatan dan perlindungan dari perlakuan yang tidak layak. Hal ini sangat relevan bagi WBP lansia, mengingat mereka membutuhkan perhatian khusus dalam hal kesehatan dan kesejahteraan. Peraturan ini juga memberikan ruang bagi lapas untuk mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif, sesuai dengan kondisi individu WBP, termasuk mereka yang sudah lanjut usia (Muhammad Syahdiyar, 2020).

Secara internasional, pendekatan Dynamic Security terhadap WBP lansia juga sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Meskipun fokus utama konvensi ini adalah pada hak-hak penyandang disabilitas, prinsip-prinsip yang diusungnya sangat relevan bagi WBP lansia yang sering kali memiliki keterbatasan fisik dan mental yang serupa dengan disabilitas. Konvensi ini menekankan pentingnya aksesibilitas, perlindungan khusus, dan perlakuan yang adil bagi kelompok rentan, yang dalam konteks masyarakat termasuk WBP lansia.

Dengan demikian, penerapan Dynamic Security dalam pengelolaan WBP lansia di Lapas Kelas 1 Sukamiskin tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan efektivitas manajemen keamanan, tetapi juga merupakan bentuk implementasi dari kewajiban hukum negara untuk melindungi dan menghormati hak-hak WBP, khususnya yang berusia lanjut. Pendekatan ini memungkinkan adanya keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan penghormatan terhadap martabat manusia, yang menjadi inti dari reformasi masyarakat di Indonesia. Pendekatan ini juga selaras dengan cita-cita masyarakat yang berkeadilan, di mana rehabilitasi dan reintegrasi sosial menjadi tujuan utama, bukan sekadar penghukuman.

## METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana sumber utama menjadi acuan dalam penulisan ini adalah study literatur yang mana dapat digali dari beberapa referensi dari jurnal serta dari beberapa regulasi yang terkait dengan program penulisan yang memang sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, pendekatan yang dipakai dalam proses penulisan ini adalah yuridis empiris yang mana dengan melihat hukum secara regulasi dan juga melihat fenomena dari proses regulasi yang ditetapkan

serta melihat dari fenomena yang memang terjadi dalam lapangan, dengan metode ini diharapkan dapat menjelaskan banyak fenomena yang terjadi dalam lembaga pemasyarakatan dan dapat menjelaskan secara lebih komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana melakukan SOP pengamanan dan keamanan terhadap narapidana lansia dilapas kelas 1 Sukamiskin

Pengamanan dan keamanan yang diberikan kepada lapas sukamiskin untuk menjalankan fungsi dan tugas pengamanan dan keamanan yang sudah tertera dalam permenkumham 33 tahun 2015 dalam lembaga pemasyarakatan. Pengelolaan keamanan dan pengamanan terhadap narapidana lansia di Lapas Kelas 1 Sukamiskin memerlukan pendekatan yang holistik serta peka terhadap kebutuhan khusus yang dimiliki oleh kelompok ini (Peraturan Menteri Hukum dan HAM, 2015). Standar Operasional Prosedur (SOP) yang efektif harus mencakup berbagai dimensi, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial, sehingga mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi narapidana lansia. Langkah awal yang sangat penting adalah melakukan penilaian risiko individual untuk setiap narapidana lansia.

Penilaian ini harus mencakup identifikasi terhadap potensi masalah kesehatan yang mungkin mereka hadapi, keterbatasan mobilitas, serta kerentanan mereka terhadap berbagai situasi yang mungkin muncul di lingkungan pemasyarakatan. Dengan informasi ini, penempatan sel dan fasilitas di dalam lapas harus diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan kondisi masing-masing narapidana lansia. Misalnya, mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas harus ditempatkan di sel yang terletak di lantai bawah atau di lokasi yang dekat dengan pos petugas untuk memudahkan akses dan meningkatkan rasa aman mereka (Putri Anisa, 2021).

Pengawasan terhadap narapidana lansia juga perlu ditingkatkan, namun harus dilakukan dengan cara yang tetap menjaga privasi dan martabat mereka sebagai individu. Pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh tenaga medis serta pengawasan dari petugas yang telah mendapatkan pelatihan khusus dalam perawatan geriatri merupakan langkah yang tepat untuk memastikan kebutuhan kesehatan mereka terpenuhi. Selain itu, SOP harus mencakup protokol khusus untuk situasi darurat, seperti evakuasi dalam kondisi bencana, yang dirancang untuk memperhitungkan keterbatasan mobilitas narapidana lansia. Prosedur ini harus memastikan bahwa mereka dapat dievakuasi dengan aman dan efisien tanpa mengorbankan keselamatan atau kesejahteraan mereka.

Dalam hal program rehabilitasi, kegiatan yang disediakan untuk narapidana lansia juga harus disesuaikan dengan kondisi fisik mereka dan memperhitungkan minat serta kemampuan individu. Aktivitas fisik yang ringan, misalnya senam atau berjalan kaki, serta kegiatan yang mendukung kesehatan mental seperti terapi kelompok, kegiatan seni, atau hobi, sangat penting untuk membantu mereka tetap sehat secara fisik dan mental. Program-program ini tidak hanya menjaga keseimbangan fisik tetapi juga memberikan dukungan psikologis yang sangat dibutuhkan oleh narapidana lansia, terutama mereka yang mungkin mengalami isolasi sosial atau perasaan terpinggirkan (P & Subroto, 2022).

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah pelatihan khusus bagi petugas lapas. Petugas harus dibekali pengetahuan tentang cara berkomunikasi dan menangani narapidana lansia, termasuk kemampuan mengenali gejala penyakit umum yang dialami oleh kelompok usia lanjut, seperti demensia, penyakit jantung, atau gangguan mobilitas, serta cara memberikan respons yang tepat terhadap gejala-gejala tersebut. Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa narapidana lansia diperlakukan dengan baik dan kebutuhan medis mereka ditangani secara profesional.

Selain itu, konflik antargenerasi di dalam lapas merupakan isu yang harus diwaspadai. Narapidana lansia mungkin menghadapi intimidasi, pelecehan, atau bahkan eksploitasi dari narapidana yang lebih muda. Oleh karena itu, SOP harus mencakup mekanisme perlindungan yang jelas untuk melindungi mereka dari ancaman semacam ini. Pengawasan ekstra serta prosedur pelaporan yang efektif sangat penting untuk menangani insiden semacam itu dan memastikan bahwa narapidana lansia tidak mengalami perlakuan yang tidak manusiawi atau diskriminatif.

Terakhir, SOP harus mencakup mekanisme pelaporan dan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas kebijakan dan prosedur yang diterapkan. Evaluasi ini perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa pengelolaan narapidana lansia tetap sesuai dengan perkembangan kondisi mereka dan perubahan situasi di lapas. Apabila diperlukan, penyesuaian terhadap SOP harus dilakukan dengan segera untuk terus menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan narapidana lansia di Lapas Kelas 1 Sukamiskin. Pendekatan yang berkesinambungan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, manusiawi, dan sesuai dengan standar hak asasi manusia yang diakui secara nasional maupun internasional (Pemasyarakatan, 2015).

Evaluasi yang diberikan dalam system keamanan dan pengamanan harus sesuai dengan SOP yang ada dalam lapas kelas 1 sukamiskin yang mana telah ditetapkan dalam regulasi yang telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2015 tentang

keamanan dan pengamanan dalam lembaga pemasyarakatan, keamanan yang diberikan kepada narapidana yang telah diklasifikasikan sebagai narapidana lansia harus mendapatkan treatment yang berbeda dengan narapidana pada umumnya. Perlunya perhatian khusus memang yang memberikan perlakuan khusus yang memang pada dasarnya narapidana lansia memang memerlukan perhatian serta rasa aman walaupun dalam lembaga pemasyarakatan.

Implementasi dynamic security yang humanisme terhadap narapidana lansia di lapas kelas I Sukamuiskin

Pendekatan Dynamic Security yang humanis bagi narapidana lansia di Lapas Kelas I Sukamiskin merupakan sebuah langkah penting yang mengintegrasikan aspek keamanan aktif dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta memperhatikan kebutuhan khusus para narapidana yang sudah lanjut usia. Pendekatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang menekankan bahwa sistem keamanan dalam lapas harus mampu menyeimbangkan antara aspek pengamanan dengan pembinaan yang berfokus pada rehabilitasi (Pudyatmoko & Aryadi, 2022). Bagi narapidana lansia, aspek pembinaan ini menjadi semakin penting, mengingat banyak dari mereka yang memerlukan perhatian khusus, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental. Dalam konteks ini, Dynamic Security menawarkan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan kontrol fisik, tetapi juga membangun interaksi yang positif dan manusiawi antara petugas dan narapidana.

Konsep Dynamic Security, sebagaimana dijelaskan oleh ahli pemasyarakatan Andrew Coyle dalam bukunya *A Human Rights Approach to Prison Management*, menekankan pentingnya hubungan yang positif dan interaktif antara petugas dan narapidana. Pendekatan ini sangat relevan untuk diterapkan pada narapidana lansia, mengingat mereka memiliki kebutuhan khusus yang lebih kompleks dibandingkan narapidana yang lebih muda. Petugas lapas harus mendapatkan pelatihan khusus yang memungkinkan mereka untuk lebih memahami dan merespons kebutuhan unik narapidana lansia, terutama yang berkaitan dengan masalah kesehatan fisik dan mental. Pelatihan ini harus mencakup pengetahuan tentang berbagai penyakit degeneratif yang umumnya dialami lansia, cara mengelola stres yang dialami oleh orang tua, serta teknik komunikasi yang efektif dalam menghadapi kondisi lansia. Dengan adanya pemahaman yang mendalam,

petugas akan mampu memberikan perlakuan yang lebih sesuai dan empatik terhadap narapidana lansia.

Selain pelatihan untuk petugas, implementasi Dynamic Security yang humanis juga harus menciptakan lingkungan lapas yang mendukung serta merangsang aktivitas positif bagi narapidana lansia. Program-program kegiatan yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan fisik mereka perlu dikembangkan, agar para lansia tetap dapat aktif dan merasa bermanfaat. Contohnya, kegiatan seperti berkebun, seni, atau bahkan program mentoring bagi narapidana yang lebih muda bisa menjadi sarana yang tidak hanya menjaga kesehatan fisik mereka, tetapi juga memberikan stimulasi mental yang sangat dibutuhkan. Dr. Brie Williams, seorang ahli dalam perawatan kesehatan koreksional bagi lansia, menekankan pentingnya kegiatan-kegiatan yang bermakna ini dalam menjaga keseimbangan kesehatan fisik dan mental narapidana lansia. Melalui aktivitas-aktivitas yang bermakna, narapidana lansia akan merasa lebih dihargai dan diakui, sehingga kesejahteraan mereka secara keseluruhan dapat meningkat (Lapas, lia, & Indonesia, 2024).

Aspek lain yang sangat penting dalam pendekatan ini adalah pengintegrasian layanan kesehatan yang komprehensif ke dalam sistem keamanan dinamis. Layanan kesehatan bagi narapidana lansia harus diatur sedemikian rupa sehingga pemeriksaan kesehatan rutin dilakukan secara berkala dan narapidana memiliki akses yang cepat terhadap perawatan medis apabila dibutuhkan. Strategi pencegahan untuk masalah kesehatan umum pada lansia, seperti penyakit jantung, diabetes, atau gangguan mobilitas, juga perlu diterapkan. Pendekatan ini sesuai dengan Standar Minimum PBB untuk Perlakuan terhadap Tahanan (Nelson Mandela Rules), khususnya Aturan 25, yang mengharuskan negara menyediakan layanan kesehatan yang setara dengan yang tersedia di masyarakat umum bagi narapidana. Hal ini memastikan bahwa hak narapidana lansia untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai tetap terjaga, sekaligus memperkuat tujuan rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan.

Selain itu, Dynamic Security juga harus memperhatikan aspek psikososial narapidana lansia, yang sering kali terisolasi dari hubungan sosial dan keluarga mereka. Penting bagi lapas untuk memfasilitasi kontak narapidana dengan keluarga, karena ikatan sosial yang kuat sangat penting untuk kesejahteraan emosional narapidana lansia. Prof. John Pratt, seorang kriminolog, menekankan pentingnya mempertahankan hubungan sosial bagi narapidana, terutama dalam konteks pemenjaraan jangka panjang, seperti yang sering dialami oleh narapidana lansia. Dengan memfasilitasi kunjungan keluarga atau komunikasi jarak jauh melalui media digital, lapas dapat membantu narapidana lansia merasa tetap

terhubung dengan dunia luar, sehingga mengurangi risiko depresi dan gangguan mental lainnya.

Selain pelaksanaan program yang komprehensif, evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan menjadi bagian penting dari penerapan Dynamic Security yang efektif. Lapas Kelas I Sukamiskin harus secara teratur mengevaluasi efektivitas program-program yang diterapkan, baik dari sudut pandang petugas maupun narapidana lansia itu sendiri. Umpan balik dari narapidana dan staf harus digunakan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan, sehingga pendekatan ini tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan yang berkembang seiring waktu. Prinsip manajemen kualitas total yang semakin diadopsi dalam sistem pemasyarakatan modern dapat menjadi acuan dalam memastikan kualitas pelayanan dan keamanan yang terus meningkat(Purba, 2019).

Tidak kalah pentingnya, pendekatan Dynamic Security juga harus mempertimbangkan transisi dan persiapan pembebasan bagi narapidana lansia. Program-program yang dirancang untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat, seperti pelatihan keterampilan yang relevan, dukungan psikologis, serta bantuan dalam penyesuaian kembali dengan kehidupan sosial, harus menjadi bagian integral dari pendekatan ini. Proses ini tidak hanya penting untuk kesejahteraan individu narapidana, tetapi juga berperan dalam mengurangi tingkat residivisme dan memastikan bahwa narapidana lansia dapat kembali berfungsi secara efektif dalam masyarakat setelah menjalani masa pidana mereka.

Dengan mengintegrasikan semua aspek ini dari pelatihan petugas, penyediaan layanan kesehatan yang memadai, penciptaan program-program rehabilitasi yang relevan, hingga persiapan pembebasan yang menyeluruh Lapas Kelas I Sukamiskin dapat membangun lingkungan yang aman sekaligus mendukung kesejahteraan dan rehabilitasi narapidana lansia. Pendekatan ini tidak hanya sesuai dengan standar internasional seperti Nelson Mandela Rules, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan, yang menempatkan hak asasi manusia dan rehabilitasi sebagai prioritas utama.

## SIMPULAN

Pendekatan dynamic security bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) lansia di Lapas Kelas 1 Sukamiskin memberikan dampak positif dalam menjaga keseimbangan antara keamanan dan kesejahteraan mereka. Metode ini mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi, di mana petugas tidak hanya berfokus pada aspek pengamanan

fisik, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis dan kebutuhan personal WBP lansia. Pendekatan ini mampu meredam potensi konflik dan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Selain itu, program rehabilitasi dan dukungan sosial yang diintegrasikan ke dalam pendekatan ini turut berperan dalam meningkatkan kualitas hidup para WBP lansia, serta membantu mereka mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dasar, U., Indonesia, R., & Dasar, U. (2022). *Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan*. (143384).
- Indonesia, R. (1999). *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*. Republik Indonesia, 1999.
- Lapas, P., Ili, K., & Indonesia, D. I. (2024). *Strategi dan penataan keamanan*. 7(1), 313–322.
- Muhammad Syahdiyar. (2020). Darurat Peraturan Tentang Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(1), 99–111. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2167>
- Optimalkan Pembinaan Kemandirian, Lapas Kelas I Medan Laksanakan Perjanjian Kerjasama dengan 4 Stakeholder - Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. (n.d.). Retrieved September 7, 2023, from <https://sippn.menpan.go.id/berita/81916/lembaga-pemasyarakatan-kelas-i-medan/optimalkan-pembinaan-kemandirian-lapas-kelas-i-medan-laksanakan-perjanjian-kerjasama-dengan-4-stakeholder>
- P, A. R. P., & Subroto, M. (2022). *EVALUASI PENERAPAN COMMUNITY BASED CORRECTION PADA SISTEM PEMASYARAKATAN DI DALAM PROGRAM PEMBINAAN LAPAS KELAS 1 MADIUN*. 10(2), 106–118.
- Pemasyarakatan, D. J. (2015). *Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Pas-416.Pk.01.04.01.Tahun 2015 Tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Lapas Dan Rutan*.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM. (2015). Permen Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. *Permen, Nomor 65(879)*, 2004–2006.
- Pudyatmoko, Y. S., & Aryadi, G. (2022). *Pelayanan Prima Narapidana Korupsi di Lembaga*

*Pemasyarakatan*. 146–165. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i01.p11>

- Purba, N. D. (2019). Implementasi Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Program Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda. *Journal Sosiatri-Sosiologi*, 7(31), 1–17. Retrieved from [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/01\\_format\\_artikel\\_ejournal\\_mulai\\_hlm\\_Ganjil\\_\(01-08-19-01-09-03\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil_(01-08-19-01-09-03).pdf)
- Putri Anisa, P. W. (2021). Strategi Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di dalam Lapas Kelas III Surulangun Rawas. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1085–1090.